



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 BPPP AMBON





KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2026. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra BPPSDM KP Tahun 2025-2029 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Triwulan I Tahun 2026, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Perjanjian kinerja dengan Pusat Pelatihan KP mencakup 2 sasaran kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP terdiri atas 1 sasaran kegiatan dengan 6 IKU. Laporan kinerja ini memuat uraian mengenai

target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026, keberhasilan maupun kendala program, permasalahan yang dihadapi beserta solusi yang ditempuh, serta capaian kinerja lainnya yang telah diraih oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2026 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 21 April 2026

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Dessy Rompis S.AP

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Rizky Irawan Attamimi, S.Kom

Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Stat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon.....	2
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahun 2026.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	16
2.4 Pengukuran Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Prestasi Kinerja	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.3 Akuntabilitas Keuangan	59
3.4 Efisiensi Anggaran.....	61
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	63
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	65
LAMPIRAN	

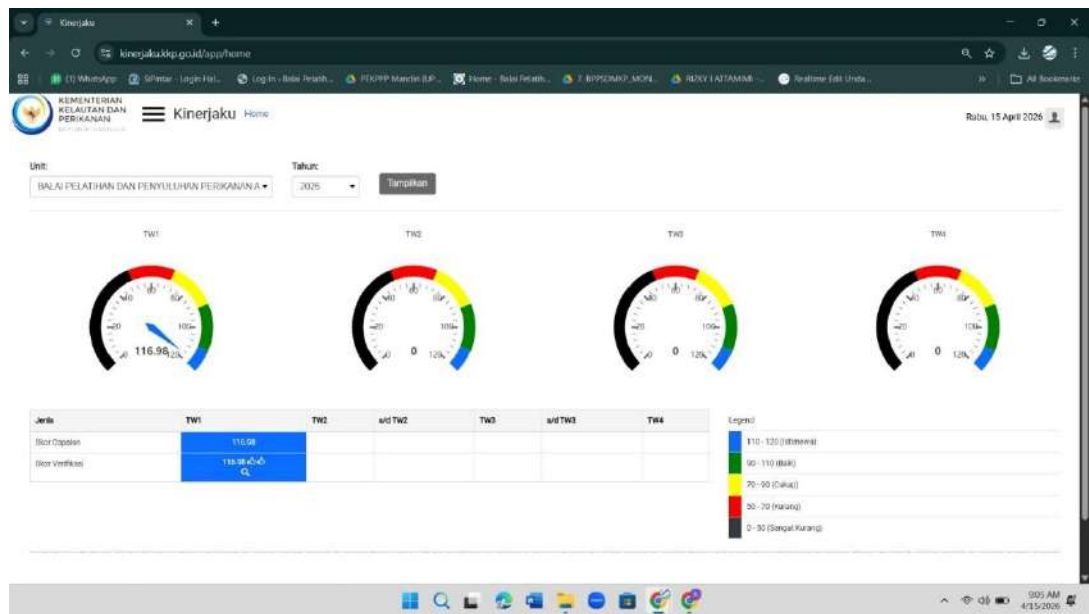
IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada Triwulan I Tahun 2026 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Berdasarkan perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP yang terdiri dari 1 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Utama (IKU). Dari Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2026.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon menurut Dashboard Kinerja BPPP Ambon Tahun 2026 sebesar **116,98%** yang diperoleh dari Selama Triwulan I Tahun 2026, dari 22 IKU yang menjadi target Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.



SS Dashboard Capaian Kinerja BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026

Selama Triwulan I Tahun 2026, dari 7 IKU yang menjadi target Triwulan I Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608			
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	800			
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	1			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1			
		6	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,22	0.03	0.04	120
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1		-	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% REALISASI
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)				
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	25	25,93	103,72
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81			
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	86	100	116,28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	77	100	120,00
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71			
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92			
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5			
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100	10	13	120,00 %
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	3,344	500	510	102,00 %
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	317	20	24	120,00 %
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	32	5	6	120,00 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% REALISASI
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1			
		22	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	2			

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Secara umum kinerja BPPP Ambon untuk Triwulan I baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir Tahundapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Perpres No. 109 Tahun 2024, merupakan dokumen pembangunan tahunan yang menjadi langkah awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, RKP 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, kesejahteraan nelayan, serta menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Dalam mendukung sasaran tersebut, ditetapkan 8 Prioritas Nasional, antara lain penguatan ideologi Pancasila, kemandirian bangsa melalui swasembada dan ekonomi hijau/biru, pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja, penguatan SDM, hilirisasi SDA, pembangunan dari desa, reformasi politik dan birokrasi, serta harmonisasi sosial dan lingkungan.

Perkembangan teknologi di era Industri 4.0 dan *Society* 5.0 menuntut perubahan pola pembangunan yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada perubahan perilaku pelaku utama serta peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, penyuluhan perikanan memiliki peran strategis sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi.

Sebagai instansi pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program berbasis kinerja, pengelolaan anggaran, serta pencapaian target sesuai visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026 tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan strategis KKP terbaru dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

1.2 Tujuan

Penyusunan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dan memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Triwulan I Tahun 2026.

Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah keseluruhan pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon hingga 31 Maret 2026 tercatat sebanyak 382 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas CPNS 3 orang, PNS 271 orang, PPPK 82 orang, PPPK Paruh Waktu 21 orang, PJLP OS 12 orang. Dengan komposisi tersebut, mayoritas pegawai BPPP Ambon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai lebih dari 70% dari total pegawai. Sementara itu, keberadaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu menunjukkan adanya dukungan tenaga profesional non-PNS untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Keragaan SDM BPPP BPPP Ambon disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Balai / Eselon III	1 Orang
2	Subbag Umum / Eselon IV	1 Orang
	Jabatan Fungsional Umum	23 Orang
	Tenaga Kontrak (PJLP, OS)	12 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	2 Orang
	- Instruktur	9 Orang
	- Penyuluh	228 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
NO	BAGIAN	JUMLAH
	- Analis SDM Aparatur	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN	2 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFU	7 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFT	75 Orang
5	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	21 Orang
	Jumlah Total	382 Orang

PNS dan PPPK BPPP Ambon berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	163	105	267
2	PPPK/PPPK Paruh Waktu	54	48	102
3	PJLP	10	2	12

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I BPPP Ambon Tahun 2026:

- a) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

- a) Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;
- b) Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- c) Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja TahunTriwulan I 2026
- d) Bab III – Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

- e) Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f) Lampiran, Perjanjian kinerja, Lampiran yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.



Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.



Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Dr. J. Leimena, Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka
- 2) Memiliki workshop yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air, lobster, hasil laut lainnya;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (2 orang widyaiswara, 9 orang instruktur, 228 orang penyuluh perikanan, 1 orang Analis SDM Aparatur, 2 Orang Pranata Keuangan APBN dan 7 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFU serta 75 orang Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja JFT);

- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat Basic Safety Training (BST);
- 9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dan pembesaran ikan kerapu pada KJA dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- 10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 14 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
- 14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

- 1) Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;

 - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;

- Kegiatan pelatihan yang dilakukan beberapa Tahun terakhir, berdasarkan program prioritas KKP namun pada kenyataan dilapangan terdapat beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

2) Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP:

- Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum merata disetiap kabupaten/kota;
- Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Strategi pengembangan SDM dijalankan melalui program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2025–2029.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

a. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang 10 Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk

Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkuat posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

b. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

milenia dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

c. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPSDM dan Puslatluh KP yang ingin dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
- 3) Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
- 4) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkup BPPSDM

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yakni :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Ambon memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2026 yang juga mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan. Adapun penjabaran program kerja BPPP Ambon dibagi menjadi 2 dalam mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP yaitu :

Dukungan Program Kerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan", dengan Indikator Kinerja :

1. Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) dengan target Tahun 2025 sebanyak 543 orang, Tahun 2026 sebanyak 608 orang, Tahun 2027 sebanyak 2,007 orang, Tahun 2028 sebanyak 2,084 orang dan Tahun 2029 sebanyak 2,222 orang
2. Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%), untuk 5 Tahun dari 2025-2029 dengan target 75%
3. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang) dengan target Tahun 2025 sebanyak 715 orang, Tahun 2026 sebanyak 800 orang, Tahun 2027 sebanyak 2,677 orang, Tahun 2028 sebanyak 2,778 orang dan Tahun 2029 sebanyak 2,962 orang
4. Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen), dengan target Tahun 2026 1 dokumen
5. Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal), dengan target Tahun 2026 1 proposal
6. Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar 0,73 rupiah miliar Tahun 2026 sebesar 0,22 rupiah miliar dan Tahun 2027-2029 sebesar 0,81 sebesar rupiah miliar.

7. Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit), untuk target 2026 1 unit
8. Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen) target 2026 1 dokumen

Dukungan Program Kerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan Kedua (SK-2) Tata Kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran yang akan dicapai adalah Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Tata Kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

9. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%) dari Tahun 2025 – 2029 target sebesar 100 %
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks) dari Tahun 2025=2029 targetnya sebesar 83
11. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai) target Tahun 2025 sebesar 81, 2026 sebesar 81.5, 2027 sebesar 82, Tahun 2028 sebesar 82,5, Tahun 2029 sebesar 82,5
12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%) target Tahun 2025 sebesar 85, 2026 sebesar 86, 2027 sebesar 87, Tahun 2028 sebesar 88, Tahun 2029 sebesar 89
13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%) Tahun 2005 dan 2026 targetnya sebesar 80, Tahun 2027 sebesar 82, Tahun 2028 83 dan Tahun 2029 targetnya sebesar 84
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 71
15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 92
16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 71,5

Dukungan Program Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategi Ke-tiga (SK-3) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Penyuluhan dan Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut:

17. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 24 kelompok Tahun 2026 sebesar 100 kelompok, Tahun 2027 sebesar 110 kelompok, Tahun 2028 sebesar 122 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 132 kelompok
18. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 2.600 kelompok, Tahun 2026 sebesar 3.344 kelompok, Tahun 2027 sebesar 3.694 kelompok, Tahun 2028 sebesar 4.003 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 4.420 kelompok
19. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 111 kelompok Tahun 2026 sebesar 317 kelompok, Tahun 2027 sebesar 279 kelompok, Tahun 2028 sebesar 279 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 272 kelompok
20. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit) Tahun 2025 sebesar 20 unit, Tahun 2026 – 2029 sebesar 32 unit
21. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket) Tahun 2026 – 209 sebesar 1 paket
22. Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang), Tahun 2006 sebanyak 2 orang, Tahun 2027 sebanyak 12 orang, Tahun 2027 sebanyak 16 orang dan Tahun 2029 sebanyak 20 orang

2.2 Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, maka BPPP Ambon didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 68.464.071.000-, Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan.

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2026

KODE	URAIAN	PAGU	NILAI BLOKIR	PAGU EFEKTIF
32.12	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	68,464,071,000	2,676,699,000	65,787,372,000
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi	16,021,937,000	2,676,699,000	13,345,238,000
2375.RAL.711	Peralatan dan Mesin Pelatihan KP	11,000,000,000	2,676,699,000	8,323,301,000
2375.SCC.831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih	1,752,396,000		1,752,396,000
2375.FAN.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,876,401,000		1,876,401,000
7020.QDD.646	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan peny	1,393,140,000		1,393,140,000
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	52,442,134,000		52,442,134,000
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya M	52,442,134,000		
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52,435,670,000		
2378.EBA.962	Layanan Umum	13,218,000		13,218,000
2378.EBA.994	Layanan perkantoran	52,422,452,000		52,422,452,000
001	Gaji dan Tunjangan	50,074,170,000		50,074,170,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,348,282,000		2,348,282,000
2378.EBD	Layanan manajemen Kinerja Internal	6,464,000		6,464,000
2378.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal	2,040,000		
2378.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan untuk satker vertikal	4,424,000		

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga BPPP Ambon memiliki dua perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Penyuluhan. Adapun Perjanjian Kinerja BPPP Ambon pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3. Penggabungan Perjanjian Kinerja antara Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	800
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,22
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	3,344
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	317
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	32
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1
		22	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	2

Keterangan :

	IKU dengan Pusat Pelatihan KP
	IKU dengan Pusat Penyuluhan KP

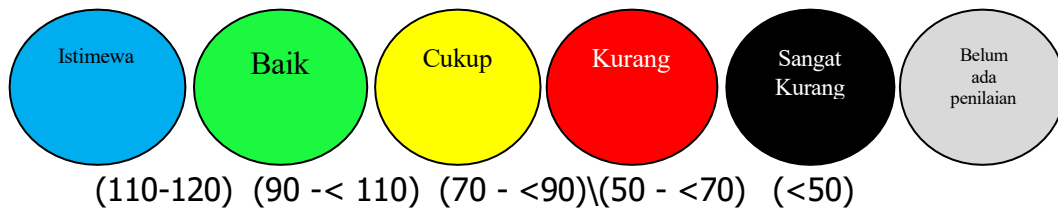
2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.01 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I BPPP Ambon Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :



Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*.

2.4.02 Metode Pengukuran Kinerja

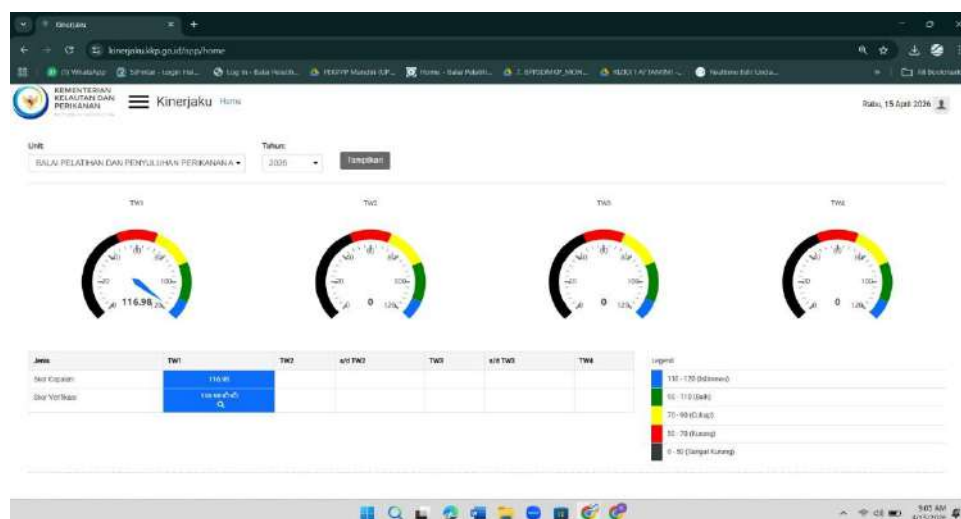
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir Tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Ambon Nomor B. 11/BPPP.AMB/OT.710/I/2026 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2026. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon Tahun 2026 sebesar 116,98%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 4 BPPP Ambon

Selama Tahun 2026 Triwulan I, dari 22 IKU yang menjadi target Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi 7 IKU sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan dapat tercapai. BPPP Ambon pada Tahun 2026 khususnya Triwulan I memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)			
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)			
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)			
		6	Nilai PNBPN Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0.03	0,04	120,00

		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)			
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% REALISASI
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	25	25,9	103,72
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)			
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	86	116,28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	77	120,00
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)			
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	10	13	120,00
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	500	510	102,00
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	20	24	120,00
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	5	6	120,00

		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)			
		22	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)			

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Salah satu visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.01.01 Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)**

IKU ini merupakan merupakan indikator adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP yang diselenggarakan secara luring mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait(mis: dinas kp, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum)/surat keterangan bekerja dari kepala Balai

Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/ S KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan) /Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

Capaian Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang), untuk Tahun 2026 sampai akhir triwulan I belum ada (kegiatan pelatihan belum dilaksanakan).

Faktor penunjang untuk keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir Tahun adalah:

- a) Terdapat Manual IKU untuk Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja
- b) Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait (mis: Dinas KP, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum)/surat keterangan bekerja dari kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/S KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan)/Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Kurikulum pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.
- c) Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a) Efisiensi biaya perjalanan sehingga membutuhkan peran penyuluh Penyuluh Perikanan dalam merekrutmen kelompok-kelompok binaan yang memiliki persyaratan yang benar dan valid.
- b) Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan manual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja masyarakat yang dilatih pada Dunia Usaha dan Dunia Industri tersebut pada akhir Tahun 2026,

BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan SDM Manusia Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan;
 2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan manual IKU sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.
 3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen seperti biodata pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.
- **IKSK.01.02 Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)**

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana peserta pelatihan masyarakat KP yang diselenggarakan pada semester II Tahun sebelumnya dan semester I Tahun berjalan dengan metode pembelajaran secara luring, mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam aktivitas nyata, baik dalam bentuk peningkatan produktivitas usaha, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, maupun penguatan kapasitas kerja di sektor KP. Data dukung indikator ini berupa dokumen Evaluasi Pasca Pelatihan yang disusun oleh penyelenggara pelatihan masyarakat KP berdasarkan metode sampling menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5% terhadap total peserta pelatihan yang memenuhi kriteria Evaluasi Pasca Pelatihan :

- a. Jumlah lulusan Pelatihan Masyarakat KP dengan metode pembelajaran luring yang dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan.
- b. Jumlah lulusan pelatihan KP yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan berdasarkan data hasil Evaluasi Pasca Pelatihan.
- c. Persentase lulusan pelatihan KP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan.

Capaian indikator ini Tahun 2026 sampai akhir Triwulan I masih belum ada (nol). Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir Tahun adalah:

- a). Terdapat Manual IKU untuk Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP

Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)

- b). Terdapatnya instrument evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih
- c). Terdapat SOP kegiatan evaluasi pasca pelatihan sebagai SOP utama BPPP Ambon.
- d) Kurikulum pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.
- e) Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a) Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pascapelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh lapangan.
- b) Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirim sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

- **IKSK.01.03 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)**

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan pelatihan *full online*. Pelatihan ini menggunakan anggaran APBN dalam DIPA BPPP Ambon TA 2026 pada RO 2375.SCC.831 yaitu Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih dengan besaran mencapai Rp.1.752.396.000, dan sampai akhir Triwulan I Tahun 2026 capaianyan masih nol (belum ada kegiatan pelatihan).

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a) Adanya Manual IKU tentang masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon.
- b) Adanya SOP kegiatan pelatihan yang merupakan SOP utama BPPP Ambon.
- c) Pelaksanaan pelatihan juga dilaksanakan secara online sehingga mudah untuk diakses masyarakat, dengan memberikan peluang secara khusus bagi

masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan menggunakan media Whatshapp.
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang pelatihan bekerjasama dengan bagian penyelenggaraan pelatihan agar masing-masing bidang menyiapkan judul materi full online sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah.
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara zoom meeting maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.
3. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

- **IKSK.01.04 Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Dokumen)**

IKU ini merupakan Indikator kinerja yang mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPP Ambon kepada Pusat, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan, dengan ketentuan :

1. Adanya Naskah perangkat pelatihan BPPP Ambon
2. Surat Penyampaian Naskah perangkat pelatihan BPPP Ambon ke Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan.

sampai akhir Triwulan I Tahun 2026 capaianyan masih nol (belum ada naskah yang disusun dan diusulkan).

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a). Adanya Manual IKU tentang Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon
- b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksanaan pelatihan.
- b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan manual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan memiliki konsep perangkat pelatihan yang sesuai dengan Manual IKU yang diharapkan.
2. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

- **IKSK.01.05 Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan Dan Perikanan Bppp Ambon (Proposal)**

Indikator kinerja yang mengukur jumlah usulan proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap bidang kelautan dan perikanan yang disusun dan diajukan oleh Balai Pelatihan kepada Pusat Pelatihan KP. Proposal ini memuat rancangan pengembangan metode atau teknologi pelatihan yang akan diuji coba di lapangan (kaji terap) untuk memastikan efektivitasnya sebelum dijadikan standar materi pelatihan. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan dokumen proposal yang telah dikirimkan untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi, pembahasan, dan validasi di tingkat pusat.

Sampai akhir Triwulan I Tahun 2026, proposal inovasi Berbasis Kaji Terap

masih dipersiapkan oleh Instruktur, sehingga pencapaiannya masih o proposal.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a). Adanya Manual IKU tentang Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan Dan Perikanan Bppp Ambon (Proposal)
- b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksanaan pelatihan.
- b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan manual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan memiliki konsep perangkat pelatihan yang sesuai dngan Manual IKU yang diharapkan.
2. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

• **IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).**

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan. Cara

perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon.

Sampai akhir Triwulan I (Januari sampai dengan Maret) Tahun 2026 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan nota dinas dari Sekertaris BPPSDM KP NOMOR 1448/BPPSDM.1/KU.340/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Capaian Kinerja PNBP Satker BPPSDM Tahun 2026 adalah sebesar 42.371.691 atau 120,00 % dari target 229.683.000.

Tabel 5. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026

IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0.25	0.29	0.29	0.78	0.22	0.04	18.18	-94.87	0.81	4.94

Capaian indikator ini telah mencapai 0,35 rupiah miliar dari target yaitu 0,22 rupiah miliar pada Triwulan I Tahun 2026.

Kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4.05	5.06	120,00
2	BPPP Banyuwangi	0.03	0.22	120,00
3	BPPP Bitung	0.06	0.25	120,00
4	BPPP Ambon	0.03	0.04	120,00
5	BPPP Medan	0.02	0.01	50,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas BPPP Ambon berada pada posisi nomor 4 diantara 5 Satker dikarenakan Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun

pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

- a. Adanya Manual Iku tentang Nilai PNBP Satker BPPP Ambon.
- b. Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.
- c. Peningkatan pelayanan pelatihan melalui pengembangan aplikasi digital.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aset barang milik negara yang dilaksanakan secara optimal.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini pada akhir TW I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.
2. Meningkatkan optimalisasi aset dan rapat monitoring capaian PNBP secara periodik.

• **IKSK.01.07 SARANA PRASARANA PELATIHAN KP YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA DI BPPP AMBON (UNIT)**

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan mutu penyelenggaraan pelatihan. Peningkatan kapasitas dimaksud mencakup perbaikan, modernisasi, penambahan fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan pembelajaran. Pembuktian dilakukan melalui dokumen resmi berupa Data awal rencana Peningkatan kapasitas Saprasi Bukti SPK/ Kontrak.

Sampai akhir triwulan 1 Tahun 2026, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi pengadaan sarana prasarana pelatihan KP sehingga penilaiannya masih 0 unit.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir Tahun adalah :

1. Adanya Manual IKU tentang Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit).
2. Tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang yang sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Melaksanakan pengadaan barang yang tersedia pada layanan E-Katalog sehingga memudahkan untuk menyesuaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh LPSE.

- **IKSK.01.08. PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPP AMBON (DOKUMEN)**

Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pelatihan sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM.

Sampai akhir triwulan 1 Tahun 2026, penyiapan data kebutuhan pengembangan kompetensi masih belum dilakukan sehingga penilaiannya masih 0 dokumen.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a). Adanya Manual IKU tentang data kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih.
- b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksanaan pelatihan.
- b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan manual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

- a). Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan data kebutuhan dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Manual IKU yang diharapkan.
- b). Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang

pelatihan yang dimiliki.

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

• IKS.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Pusat Pelatihan KP meliputi antara lain layanan keuangan, layanan pengendalian internal, layanan kepegawaian dan layanan pengelolaan BMN.

Pemenuhan layanan dukungan manajemen internal berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon. Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon, dan sampai dengan triwulan I Tahun 2026, perhitungan ini dilakukan, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan, BPPP Ambon sudah memenuhi dokumen pendukung baru mencapai 25,93 %.

Tabel 7. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

No	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan I)	Link Dokumen
1	Dokumen Laporan SPIP				
	1) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026	Triwulan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1Sq3mGGf2C0yLj-J1lp37pjp1Xr0Aap?usp=drive_link
	2) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2026	Triwulan	1		
	3) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2026	Triwulan	1		
	4) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2026	Triwulan	1		
2	Laporan Realisasi Anggaran	Bulanan			
	1) Laporan Realisasi Anggaran Januari 2026	Bulanan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1cyfAaYDt4ax2A2LoZYQTaSYavowldrFz?usp=drive_link
	2) Laporan Realisasi Anggaran Februari 2026	Bulanan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1cyfAaYDt4ax2A2LoZYQTaSYavowldrFz?usp=drive_link
	3) Laporan Realisasi Anggaran Maret 2026	Bulanan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1cyfAaYDt4ax2A2LoZYQTaSYavowldrFz?usp=drive_link

	4) Laporan Realisasi Anggaran April 2026	Bulanan	1		
	5) Laporan Realisasi Anggaran Mei 2026	Bulanan	1		
	6) Laporan Realisasi Anggaran Juni 2026	Bulanan	1		
	7) Laporan Realisasi Anggaran Juli 2026	Bulanan	1		
	8) Laporan Realisasi Anggaran Agustus 2026	Bulanan	1		
	9) Laporan Realisasi Anggaran September 2026	Bulanan	1		
	10) Laporan Realisasi Anggaran Oktober 2026	Bulanan	1		
	11) Laporan Realisasi Anggaran November 2026	Bulanan	1		
	12) Laporan Realisasi Anggaran Desember 2026	Bulanan	1		
3	Laporan Keuangan				
	1) Semester II Tahun 2025	Semester	1	1	https://drive.google.com/file/d/13LApeUx_1eqTbZzicDtMAhgOTkEAGdkJ/view?usp=sharing
	2) Semester I Tahun 2026	Semester	1		
4	Laporan PIPK 2026	Tahunan	1		
5	Manajemen Resiko	Triwulan			
	1) Matriks MR Triwulan I Tahun 2026	Triwulan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1qUw8b31MvImArz3iu9XuWfVf10HCMQ0?usp=drive_link
	2) Matriks MR Triwulan II Tahun 2026	Triwulan	1		
	3) Matriks MR Triwulan III Tahun 2026	Triwulan	1		
	4) Matriks MR Triwulan IV Tahun 2026	Triwulan	1		
6	Laporan Kepegawaian	Tahunan	1		
7	RKABMN	Tahunan	1		
8	Laporan Pengelolaan BMN				
	1) Semester II Tahun 2025	Semester	1	1	https://drive.google.com/file/d/1fHrd5_4bOuegaav_iIGuAzCkLYdePO6J/view?usp=drive_link
	2) Semester I Tahun 2026	Semester	1		
	Jumlah		27	7	Dokumen
	%		100	25.93	

Capaian indikator ini sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai 25,93 dari target yaitu 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (%)	Realsiasi (%)	% Capaian
1	BPPP Tegal	25,00	29,63	119,00
2	BPPP Banyuwangi	25,00	29,63	119,00
3	BPPP Bitung	25,00	29,63	119,00
4	BPPP Medan	25,00	29,63	119,00
5	BPPP Ambon	25,00	25,93	104,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 5 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja manajemen internal dengan output yang ditargetkan per masing-masing pegawai.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.
2. Dokumen dukungan internal merupakan dokumen yang harus ada dimiliki dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Melakukan rapat monev capaian kinerja setiap dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.
2. Kegiatan penyusunan laporan /dokumen dukungan internal.

• **IKSK.02.02 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon(%)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan dilakukan perhitungan setiap semester sehingga pencapaian pada triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat- diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai Media sosial Whatsapp.

• **IKSK.02.03 Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)**

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada Tahun2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Sampai pada Triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon masih melakukan pengumpulan data terkait pemenuhan dokumen SAKIP dan hasil capaiannya akan dilakukan pada akhir Tahun 2026 sehingga pencapaiannya masih 0. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU sebagai berikut :

1. Adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.
2. Adanya ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan selama 5 tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu template penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal Tahunsebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan.

2. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon.
3. Adanya upaya baru dalam perencanaan/pengukuran dan pelaporan kinerja.

• **IKSK.02.04 Presentasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{100\%} \times 100\%$$

Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan nota dinas dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tentang Capaian IKU Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 86% dari target triwulan I Tahun 2026 sebesar 86%.

Tabel 9. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKSK.02.04 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
70	75	60	85	86.00	100.00	116.28	17.65	89.00	112.36

Berdasarkan tabel diatas realisasi yang terlaksana sebesar 86% dari target senilai 86 %.

Realisasi IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (%)	Realsiasi (%)	% Capaian
1	BPPP Tegal	86,00	100,00	116,28
2	BPPP Bitung	86,00	100,00	116,28
3	BPPP Ambon	86,00	100,00	116,28
4	BPPP Banyuwangi	86,00	86,00	100,00
5	BPPP Medan	86,00	86,00	100,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon hampir setara dengan Satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melalui aplikasi SIDAK.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan mengupload hasil tindaklanjut tersebut kedalam aplikasi SIDAK

2. Berkoordinasi Inspektorat Jenderal KKP untuk mengkonfirmasi temuan yang sudah ditindaklanjuti agar dapat segera menuntaskan status temuan menjadi nihil pada aplikasi SIDAK.

- **IKSK.03.05 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada Sirup BPPP Ambon (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari Biro Umum PBJ yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertariat Jenderal Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tentang penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja presentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Tahun anggaran 2026, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target triwulan 1 2026 sebesar 77%.

Tabel 11. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)

IKSK. 02.05 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	77.00	100.00	120.00	17.65	89.00	112.36

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	BPPP Tegal	77,00	100,00	120,00
2	BPPP Banyuwangi	77,00	100,00	120,00
3	BPPP Bitung	77,00	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	77,00	100,00	120,00
5	BPPP Medan	77,00	100,00	120,00

Jika melihat tabel diatas, kinerja seluruh satuan kerja di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan seragam pada indikator pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIRUP KKP yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk mengumumkan seluruh RUP PBJ pada aplikasi SIRUP.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIRUP KKP sehingga progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon melakukan koordinasi dengan Biro UMUM PBJ KKP terkait progres rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **IKSK.02.06 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Bppp Ambon (Nilai)**

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2026, dengan Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) yang terdiri dari penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%) penyusutan arsip (25%) dan Sumber daya kearsipan (bobot 50%) yang terdiri dari sumber daya manusia kearsipan (50%), serta prasarana dan sarana (50%). Penilaian IKU ini dilakukan secara Tahunan dengan demikian sampai dengan

akhir Triwulan I Tahun 2026 penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Bppp Ambon (Nilai)
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan/Arsiparis: Adanya tenaga kearsipan yang kompeten dan berpendidikan khusus (minimal D3 Kearsipan) sangat penting untuk pengelolaan yang sistematis.
3. Sarana dan Prasarana Kearsipan: Penyediaan fasilitas fisik yang memadai, seperti lemari besi/loker khusus, gudang arsip yang luas, serta ruang penyimpanan yang aman dari kerusakan (tahan api/lembab).
4. Digitalisasi dan Teknologi Informasi: Penerapan sistem kearsipan berbasis digital (e-arsip) membantu mengurangi penumpukan arsip fisik, menjaga keamanan data, serta mempercepat akses informasi. Ini termasuk penggunaan komputer, pemindai (scanner), dan jaringan internet/WiFi yang memadai.
5. Prosedur Pengelolaan Arsip (SOP): Penerapan prosedur yang standar dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip agar tertib administrasi

- **IKSK.02.07 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain ; (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Nilai IKPA adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP

yang akan dihitung setiap semesteran sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Tersedianya Manual IKU tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai).
2. Tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.
3. Pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja Banyuwangi terhadap komponen dan indikator dari penilaian IKPA serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2025-6, BPPP Ambon melakukan melakukan pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar IIII DIPA Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman IIII DIPA.)

- **IKSK.02.08. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk Tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2026 71,50 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain: Sangat Baik, apabila NKPA > 90; Baik, apabila NKPA >80 – 90; Cukup, apabila NKPA >60 – 80; Kurang, apabila NKPA >50 – 60; Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan dan akan diukur pada akhir Tahun 2026 sehingga nilai pencapaiannya pada Triwulan I Tahun 2026 masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Manual IKU tentang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai).
2. SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.
3. pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja terhadap komponen dan indikator dari penilaian NKPA serta disiplin dalam pelaksanaan penganggaran.

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

• IKS.02.02 Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)

Peningkatan kelas Kelompok merupakan indikasi bahwa keberfungsian kelompok telah mampu memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 bahwa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan merujuk kepada lima tolak ukur, yaitu : perencanaan, kemampuan berorganisasi, akses kelembagaan, kemampuan wirausaha, dan kemandirian, dan perhitungannya dilakukan setiap triwulan.

Tabel 13. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BPPP Ambon

IKSK.03.01 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	1	10.00	13.00	120.00	1200.00	132.00	9.85

Capaian indikator ini telah mencapai 13 kelompok dari target yaitu 10 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan Tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 Tahun 2025, terjadi peningkatan. Terhadap target Renstra Tahun 2029, capaian Tahun 2025 sebesar 120%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku pendukung BPPP Ambon sebanyak 13 kelompok dari target sebanyak 10 kelompok.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	% Capaian
1	BPPP Ambon	10,00	13.00	120,00
2	BPPP Banyuwangi	5,00	6,00	120,00
3	BPPP Bitung	1,00	2,00	120,00
4	BPPP Medan			
5	BPPP Tegal			

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 1 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan

per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
2. Adanya Manual IKU tentang peningkatan kelas kelompok.
3. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha sektor KP telah terlaksana dengan baik sesuai target Tahun 2025, dimana Kelompok yang sudah dibentuk oleh Penyuluh kemudian dilakukan pengukuhan dengan menerbitkan Berita Acara dan SK Pengukuhan yang ditandatangani oleh Pejabat wilayah setempat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascade langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.

3. Koordinasi secara rutin dengan Dinas Perikanan setempat terkait proses peningkatan kelas kelompok.
4. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

• **IKSK.03.02 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Ambon (kelompok)**

Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaku utama/usaha bidang KP yang didampingi dan dibina oleh penyuluh perikanan. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan di Satminkal BPPP Ambon. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan target sebanyak 500 kelompok, terealisasi mencapai 510 kelompok. Angka tersebut sudah akumulasi dari Januari sampai dengan Maret 2026.

Tabel 15. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama /pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Ambon

IKSK.02.08 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
600	420	600	300	500.00	510.00	102.00	70.00	4,420	11.54

Capaian indikator ini telah mencapai 510 kelompok dari target yaitu 500 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan Tahun sebelumnya yaitu triwulan I Tahun 2025, terjadi kenaikan sebesar 70%. Terhadap target Renstra

Tahun 2029, capaian triwulan I Tahun 2026 sebesar 11,54%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realsiasi (Kelompok)	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1,000	1,100	110
2	BPPP Medan	500	661	120
3	BPPP Ambon	500	510	102
4	BPPP Bitung	50	60	120
5	BPPP Tegal			

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing- masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan, disamping kegiatan pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha sektor KP dengan berbagai bentuk pengembangan seperti kegiatan berupa fasilitas proses pembelajaran, melalui pendekatan kelompok dengan cara memberikan penyuluhan secara langsung atau dengan membagikan liflet, brosur, dan lain-lain.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh berdasarkan perjanjian kinerja

yang telah diperjanjikan.

2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascade langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu :

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini dibidang perikanan.

- **IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak Tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada Tahun 2017, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir Triwulan I Tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak

24 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 20 kelompok.

Tabel 17. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang dibentuk oleh BPPP Ambon.

IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
20	20	10	8	20.00	24.00	120.00	200.00	272,00	8.82

Capaian indikator ini telah mencapai 24 kelompok dari target yaitu 20 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan Tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 Tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Terhadap target Renstra tahun 2029, capaian triwulan I tahun 2026 sebesar 8,82%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	25	35	120,00
2	BPPP Medan	20	24	120,00
3	BPPP Ambon	20	24	120,00
4	BPPP Bitung	1	2	120,00
5	BPPP Tegal	-	-	-

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024

tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan I Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2026.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

- **IKSK.03.03 Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada Tahun 2025, cara perhitungannya adalah menjumlahkan Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan.

Sampai akhir Triwulan I Tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan sebanyak 6 unit dari target triwulan I Tahun 2026 sebanyak 5 unit.

Tabel 19. Capaian Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)

IKSK.03.04 Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)									
Realisasi TW I Tahun				TW 1 Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	1	5.00	6.00	120.00	500.00	32.00	18.75

Capaian indikator ini telah mencapai 6 unit dari target yaitu 5 unit. IKU ini dibandingkan dengan Triwulan I Tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, capaian triwulan I Tahun 2026 sebesar 120%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Unit)	Realsiasi (Unit)	% Capaian
1	BPPP Medan	4	10	120,00
2	BPPP Banyuwangi	15	17	120,00
3	BPPP Ambon	5	6	120,00
4	BPPP Bitung	1	1	100,00
5	BPPP Tegal	-	-	-

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing- masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahunsehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan 1 Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2024.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

• **IKSK.03.05 Media Penyuluhan terstandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket)**

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada Tahun 2025, cara perhitungannya adalah menghitung jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya.

Sampai akhir triwulan I Tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon masih melakukan pendataan media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan dan perhitungannya akan dilakukan pada akhir Tahun 2026 sehingga pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung

sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascade langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2026.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya

• **IKSK.03.06 Penyuluh Perikanan Yang Lulus Kompetensi di BPPP Ambon**

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai

berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir Tahunsehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun2024.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 31 Maret 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	67.706.845.000	12.827.628.128	18.94	52.959.743.872
<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi</i>	12.770.740.000	25.159.525	0.18	13.320.078.475
Peralatan dan Mesin Pelatihan Penyuluhan KP	11.000.000.000	-	0	8.323.301.000
Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih	1.770.740.000	8.840.700	0.50	1.743.555.300
Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	2.052.000.000	16.318.835	0.17	1.376.821.165
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	52.884.105.000	12.802.468.603	24.41	39.639.665.397
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	<i>52.866.304.000</i>	<i>12.802.468.603</i>	<i>24.42</i>	<i>39.633.201.397</i>
Layanan Umum	35.686.000	-	0	13.218.000
Gaji dan Tunjangan	50.074.170.000	12.207.384.521	24.38	37.866.785.479
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.756.448.000	595.084.082	25.34	1.733.197.918
<i>Layanan manajemen Kinerja Internal</i>	<i>17.801.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>6.464.000</i>

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 belum semua dilaksanakan dan capaian kinerja yang di hasil belum tercapai secara optimal. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 22. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 31 Maret 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% REALISASI
1	Lulusan Pelatian KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Industri dan Dunia Usaha dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	-		
2	Jumlah presentase peserta pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang menerapkan kompetensi Hasil Perikanan di BPPP Ambon (%)	-		
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	1.770.740.000	8.840.700	0.50
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	-		
5	Propsal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan	-		
6	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	-		
7	Sarana dan Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	11.000.000.000	0	-
8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			
9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	7.083.805.000	1.689.649.522	23.85
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)			
11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	35.686.000	0	-
12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	2.756.448.000	595.084.082	25.34
13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)			
14	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Internal BPPP Ambon			
15	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	17.801.000	0	-
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
17	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	2.052.000,000	16,318,835	0.17
18	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	0	0	-
19	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	0	0	-
20	Gabungan Kelompok/Koperasi Ke;urahan Merah Putih yang mendapatka pembibingan oleh BPPP Ambon (Unit)	0	0	-
21	Media Penyuluhan Tersatandart yang disusun oleh er BPPP Ambon (Paket)	0	0	-
22	Penyuluh Perikanan yang lulus peningkatan kompetensi (orang)	42.990.365,000	10,517,734,999	24.46
Total		67,706,845,000	12.827.628.128	18.94

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu

3.4. Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel 23. Nilai Efisiensi BPPP Ambon per masing-masing Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)	PAGU TOTAL	REALISASI	Persentase Realisasi Pagu Total (%)	Presentasi Efisiensi (%)
Terselenggara nya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Lulusan Pelatian KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Industri dan Dunia Usaha dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	120,00	12.770.740.000	8.840.700	0.50	119,5
	Jumlah presentase peserta pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon byang meberapkab kompetensi Hasil Perikanan di BPPP Ambon (%)					
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)					
	Nasakah Perangkat Pelatihan Kelautan dab Pwrikanan BPPP Ambon (dokumen)					
	Propsal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Nilai PNBK Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)					
	Sarana dan Prasaran Pelatihan KP yang ditingkakan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)					
	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Twnaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)					
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	114,54	9.893.740.000	2.284.733.604	49,19	65.35
	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)					

Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)					
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)					
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)					
	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Internal BPPP Ambon					
	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)					
Terselenggara nya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	116,40	45.042.365	26.386.569	0.17	91.77
	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)					
	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)					
	Gabungan Kelompok/Koperasi Kejurahan Merah Putih yang mendapatka pembibingan oleh BPPP Ambon (Unit)					
	Media Penyuluhan Tersatandart yang disusun oleh er BPPP Ambon (Paket)					
	Penyuluh Perikanan yang lulus peningkatan kompetensi (orang)					
TOTAL		276.62	22.709.522.365	2.319.960.873	74.32	276.62

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu dan Aplikasi Kinerjaku KKP

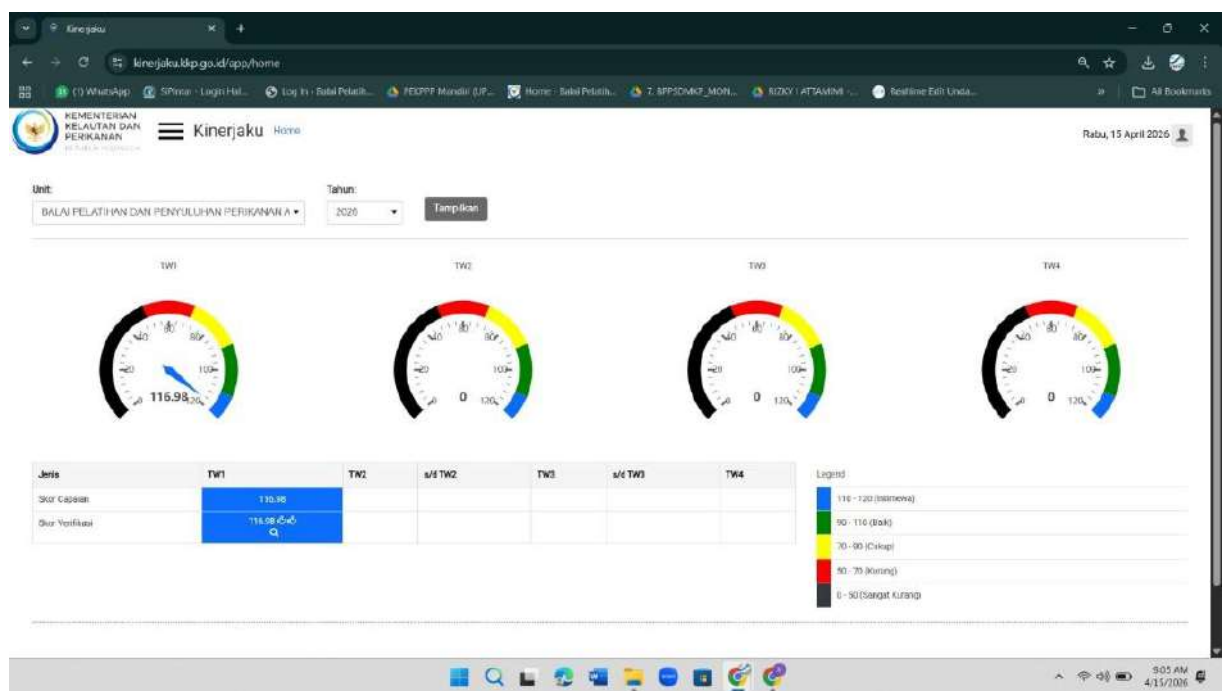
Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 memperoleh skor 276,62 hal ini dikarenakan hampir semua IKU belum terealisasi, baru mencapai 36% dari 22 IKU Tahun 2026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*), disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026 sebesar 116,98 %, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 4 BPPP Ambon

Selama Triwulan I Tahun 2026, dari 8 IKU yang menjadi target Triwulan I Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 22 IKU tersebut adalah:

Tabel 24. Capaian IKU BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)			
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)			
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)			
		6	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0.03	0,04	120,00
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)			
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	25	25,93	103,72
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)			
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	100	116,28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	100	120,00

		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)			
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	10	13	120 %
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	500	510	102 %
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	20	24	120 %
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)		6	120
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)			
		22	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)			

Sumber tabel : Aplikasi Kinerja KKP

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi triwulan I Tahun 2026, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir Tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	800
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,22
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Ambon (%)	86
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	14.822.740.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9.893.740.000
Total Anggaran BPPP Ambon		22.664.480.000

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AAMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Ambon (kelompok)	3.344
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Ambon (kelompok)	317
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	32
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1
		6	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	2

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.052.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal	42.990.365.000
Total Anggaran BPPP Ambon		45,042,365,000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 11/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2026 dipandang perlu memberikan tugas kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 dan Triwulan Tahun 2026;

2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon;

3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir.

Untuk : 1. Sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 dan Triwulan BPPP Ambon Tahun 2026 (penugasan terlampir);

2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

Lampiran Surat tugas

Nomor : B. 11/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

I. Daftar nama Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) :

No.	Nama/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.S 19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua
2.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si 19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggungjawab Pengumpulan Data
3.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si 19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Penanggungjawab Pengumpulan Data
4.	Dessy Rompis, S.AP 19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Sekretaris
5.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si 19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
6.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom 199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Anggota

II. Daftar penugasan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1.	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	Merencanakan, menyusun, memeriksa Lkj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
2.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
5.	Sekretaris	Menyusun laporan kinerja (LKj)
6.	Anggota	Membantu menyusun laporan kinerja (LKj)

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu memberi penugasan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;

3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir.

Untuk : 1. Sebagai tim teknis tata kelola kinerja BPPP Ambon Tahun 2024 (daftar penugasan terlampir);
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar

Lampiran Surat tugas

Nomor : B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

I. Daftar Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2026 :

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina IV/a	Kepala Balai	Pengarah
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Penanggung Jawab Tata Kelola Kinerja Manajerial
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Penyuluhan
5.	Rachel L. Wattimena, S.Pi.,M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
Tim Pelaksana Kesekretariatan				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Ketua
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
4.	La Tati	19680423 199203 1 001 Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengadm. Persuratan	Pelaksana Sarpras dan PNB/Manajer Kinerja
5.	Polly S.B Christian, S.St.Pi,M.Si	19770608 200312 1 004 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Pelaksana Pelatihan /Manajer Kinerja
6.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
Sub-Tim Perencanaan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
2.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Anggota
3.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
4.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Anggota
Sub-Tim Evaluasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
4.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
5.	Johanna L. Thenu, S. Pi, MP	19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d	WI Muda	Anggota
6.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
Sub-Tim Verifikasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Murni Samin, S.Sos	19771020 200604 2 009 Penata Muda III/a	Pengelola Kepegawaian	Anggota
3.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Soraya, S.Pi	198807062025212053 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota

II. Daftar Penugasan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2026 :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
3.	Pelaksana	🚩 Ketua: Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. 🚩 Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon. 🚩 Manajer Kinerja: Mengkoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan 🚩 Koordinator Sub-Tim: Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Sub-Tim serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan
4.	Sub-Tim	🚩 Sub-Tim Perencanaan Kinerja 1) Memastikan bahwa a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja telah tersusun memuat : 1. Visi, Misi, dan Program; 2. Tujuan yang berorientasi hasil, indicator kinerja tujuan, dan target; 3. Sasaran yang berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta Indikator Kinerja Utama (IKU). b. Indikator Kinerja :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		1. Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indicator kinerja level III; 2. Indikator Kinerja eselon III telah selaras dengan IKU; 3. Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan 4. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi. c. Dokumen kontrak kinerja memuat : 1. Perjanjian Kinerja (PK): i. Tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; ii. Memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan iii. Dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya. 2. Peta strategi; 3. Rincian target IKU secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; 4. Matriks cascading kinerja organisasi level III 5. Pohon kinerja level III 6. Inisiatif strategi/rencana aksi atas PK. 2) Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 3) Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing 🚩 Sub-Tim Pengukuran Kinerja 1) Menyusun pedoman / mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja; 2) Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		3) Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. 📌 Sub-Tim Pelaporan Kinerja 1) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan). 2) Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3) Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan; 4) Memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi; dan 5) Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. 📌 Sub-Tim Evaluasi Kinerja 1) Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja; 2) Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya; 3) Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan; 4) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan 5) Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. 📌 Sub-Tim Verifikasi Kinerja 1) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja; 2) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja; 3) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		4) Memastikan seluruh softcopy data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan 5) Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2026 dipandang perlu menunjuk Tim Tata Kelola SAKIP di BPPP Ambon;

2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Tim Tata Kelola SAKIP pada BPPP Ambon;

3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan atta cara review atas laporan kinerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir.

Untuk : 1. Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2026 BPPP Ambon;
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

Lampiran Surat tugas

Nomor : B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Daftar Nama Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2026:

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1	2	3	4	5
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina Tk.I IV/b	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Ketua
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Sekretaris
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Anggota

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar